

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ahl al Hall wa Al' Aqd adalah istilah baru dan tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Hadist. Istilah ini baru muncul setelah masa pasca Rasulullah SAW, para al-Shaba yang telah meletakkan istilah tersebut¹. Ini bukan berarti istilah tersebut *bid'ah*² karena belum pernah digunakan pada zaman Rasulullah SAW, maupun pada zaman Sahabat. Akan tetapi, istilah-istilah keilmuan semacam ini bisa di golongkan didalam *Masalihul Mursalah* (kemaslahatan umum) yang diizinkan oleh Syariat Islam, sebagaimana istilah-istilah *Ushul Fiqh*, *Ilmu Nahwu*, *Mustholahul Hadits* dan lain-lainnya.

Dalam kepustakaan fiqh *Siyasah Syar'iyah* ditemukan berbagai macam bidang kajian ketatanegaraan Islam, salah satunya ialah mengenai *Ahl Al all Wa Aqd* sebagai lembaga ketatanegaraan Islam. *Ahl Al all Wa Aqd* merupakan konsep politik ketatanegaraan yang dicetuskan oleh Al-Mawardi³. *Ahl Al all Wa Aqd* dibentuk untuk menjaga politik ketatanegaraan Islam, agar dapat mengikuti dan menjawab setiap perkembangan zaman. *Ahl Al all wa Al Aqd* berupaya mengedepankan tujuan hukum Islam yang didalamnya terdapat berbagai macam kemaslahatan.

¹ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*. (Jakarta: Amzah, 2005), h. 78.

² Imam Izzuddin bin Abdissalam, ulama syafi'iyah, mendefinisikan *bid'ah* dalam kitabnya, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* sebagai berikut, "Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal (terjadi) pada masa Rasulullah saw." Definisi senada juga dikemukakan oleh Imam an-Nawawi. Beliau berkata, "Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah saw".

³ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung :Pustaka Setia, 2011), h. 131



Adapun Secara bahasa, istilah *Ahl al Hall wa al' Aqd* terdiri dari tiga kalimat :

- a. *Ahl*, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki)
- b. *Al Hall* yang berarti, melepaskan, menyesuaikan, memutus, dan memecahkan.
- c. *Al Aqd* yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk.

Dalam literatur fiqh, *Ahl Al Hall Wa Al'Aqd* adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikat dan membubarkan, yaitu membuat keputusan-keputusan⁴. An Nawawi dalam *Al Minha*, *Ahl al Hall wa al' Aqd* adalah para ulama , para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat⁵. Abu A'la al-Maududi menyebutkan *Ahl al Hall wa al' Aqd* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif⁶. Imam Al Mawardi menyebutkan *Ahl al Hall wa al' Aqd* menyebut dengan *Ahl Al Ikhtiyar*⁷, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taymiyyah menyebutkan *Ahl al Hall wa al' Aqd* dengan *Ahl al Syawkah*⁸. Muhammad Abduh menyamakan *Ahl al Hall wa al' Aqd* dengan *ulil amri*⁹. Rasyid Ridha juga

⁴ Istilah itu juga bisa disebut sebagai *Ahl Al Hall Wa Al Aqd*, untuk menekankan wewenang mereka guna menghapuskan dan membatalkan, namun nampaknya bagi penulis ini lebih beralasan untuk memulai dan menekankan wewenang untuk mengikat. Fazlur Rahman, dkk. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, h.84

⁵ Muhammad Al Razi Fakh al Din Bin Dhiya al Din Umar, *Tafsir Fakhr Razi*, (Dar al Fikr, t.t), h. 170

⁶ Abul A'la Maududi, Sayyid, *The Islamic Law And Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, 1997), h. 257

⁷ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah*, (Al Qahirah: Dar al Hadits, 2006), h.7

⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 257

⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat *ulil amri* adalah *Ahl al Hall wa al' Aqd* karena mereka mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan¹⁰.

Al Razi juga menyamakan pengertian antara *Ahl al Hall wa al' Aqd* dan *ulil amri* yaitu para pemimpin dan penguasa¹¹. Sedangkan menurut para ahli Fiqih Siyasah *Ahl al Hall wa al' Aqd* adalah orang-orang yang memilki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat (warga negara) atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat¹². *Ahl al Hall wa al' Aqd* juga dikatakan 'majelis syura' sebagaimana terdapat dalam Ensiklopedi Hukum Islam¹³.

Perbedaan istilah tersebut dikarenakan melihat tugas dan fungsi atau kewenangan dari lembaga *Ahl al Hall wa al' Aqd* yakni memilih khalifah, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah, melakukan *controlling* terhadap kinerja khalifah didalam menjalankan roda kepemimpinanya¹⁴.

Secara esensi, komponen yang terdapat dalam kata *Ulil al Amri*, sama dengan tiga syarat sah menjadi seorang anggota *Ahl Al all wa Al Aqd*. Syarat sahnya sebagai berikut:

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.

¹⁰ Jubair Situmorang, *op.cit.*, h. 255

¹¹ J Suyuti Pulungan, *op.cit.*, h. 69

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 138

¹³ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 41

¹⁴ J Suyuti Pulungan, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kemampuan Intelektual membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi khalifah dengan adanya kriteria-kriteria legal, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
3. Wawasan dan sikap bijaksana membuat *Ahl Al all wa Al Aqd* mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi khalifah dan paling efektif, serta ahli dalam mengelola segala kepentingan¹⁵.

Ahl Al all wa Al Aqd dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan kepada tiga kriteria yang terdapat pada syarat sahnya anggota, seperti bertindak adil, ilmu untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi khalifah, serta wawasan dan sikap bijaksana. Apabila di analisis dari hal demikian, maka tugas dan wewenangnya hanya sekedar mengurus pemilihan, pembaiatan, pengontrolan dan tidak terkait dalam masalah-masalah lain.

Apabila diperhatikan dengan seksama, maka rincian tugas *Ahl Al all wa Al Aqd* cukup jelas sebagai lembaga perwakilan. Akan tetapi, tugas tersebut belum mampu dilaksanakan secara optimal, karena pada masa itu *Ahl Al all wa Al Aqd* hanya melakukan tugasnya sebagai dewan pemilih dan pembaiat¹⁶. Sedangkan fungsinya sebagai pembuat undang-undang yang dapat digunakan sebagai supremasi hukum, belum dapat dilakukan sepenuhnya. Apalagi tugasnya dalam hal pengawasan, tidak dilakukan dengan baik dan aspirasi rakyat dalam urusan-urusan yang lain seperti ekonomi, sosial, budaya, hukum tidak juga dimaksimalkan.

¹⁵ Al –Mawardi, *Al –Ahkam Al Sulthaniyyah*, Alih bahasa Fadhli Bahri(Jakarta: Darul Falah,2006), h. 3

¹⁶ J Suyuti Pulungan, *op.cit.*, h 67

Menilik dari pengertian, landasan utama, syarat sah anggota, tugas dan wewenang, menyatakan bahwa *Ahl Al 'all wa Al 'Aqd* adalah Dewan Perwakilan Ummat yang terdiri dari ulama, umara, dan ahli pikir. Ulama mempunyai tugas untuk membahas tentang kaidah-kaidah konstitusional (Al Qur'an dan Al Sunnah) dan umara mengatur jalannya politik pemerintahan yang berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan ahli pikir adalah orang yang mempunyai spesialisasi cakrawala pengetahuan untuk menciptakan kemaslahatan¹⁸. Perkara tersebut, mendorong para pakar undang-undang konstitusional modern dan politik ketatanegaraan Islam untuk mengatakan, bahwa parlemen sama dengan Ahlu Syura dalam Islam. Kebenaran perkataan ini, tidak terpengaruh dengan adanya perbedaan disekitar kaum Islam dimasa awal itu telah mengenal dengan dewan legislatif atau tidak. Sebab, semua telah sepakat dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau *Ahl Al 'all wa Al 'Aqd* dalam komunitas kaum muslim¹⁹.

¹⁷ *Ibid.*
¹⁸ *Ibid.*, h.4
¹⁹ J Suyuti Pulungan, *op.cit.*, h 68

Mungkin dalam hal ini, tidak terlihat adanya *diffrensiasi* kelas sosial, namun disinilah terletak sebuah kelemahan, karena tidak adanya karakteristik untuk menjadi seorang wakil rakyat. Orang yang menduduki jabatan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, harus memiliki potensi di dalam ilmu sosial and sains (ahlu fikir), dan sebagai orang yang mengerti tentang akidah agama (ulama), serta sebagai orang yang cerdas pandai di dalam mengatur pemerintahan (Umara).

²⁰ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, *op.cit.*, h. 137
²¹ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik*, *op.cit.*, h. 78-79.

²¹ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik*, *op.cit.*, h. 78-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas semestinya *Ahl Al all wa Al Aqd* dari awal terbentuknya sampai sekarang. Apabila dianalisis dari pengertian *Ahlul Hall wal Aqd*, maka tugasnya ialah membuat kontrak politik dengan khalifah sebagai hasil dari kesepakatan kedua belah pihak dan hasil kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh khalifah. Dalam melaksanakan tugasnya, khalifah diawasi oleh *Ahl Al all wa al Aqd*, karena berkaitan dengan hasil kesepakatan yang telah dibentuk di dalam musyawarah.

Dari hasil analisis tersebut, *Ahl Al all wa Al Aqd* mempunyai persamaan tugas dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu bidang legislasi, pengawasan dan pemegang kedaulatan rakyat. Dalam politik kontemporer, *Ahl Al all wa Al Aqd* berkedudukan sebagai lembaga perwakilan yang bertujuan untuk mengendalikan segala aktivitas rakyat dalam politik. Mekanisme kerja *Ahl Al all wa Al Aqd* adalah menjalin kontrak politik dengan pemimpin negara demi menguatkan kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kekuasaan pemerintahan. Hasil dari kontrak politik tersebut, akan menghasilkan sebuah undang-undang yang akan dijalankan oleh pemimpin negara (khalifah).

Dapat dijelaskan, bahwa antara *Ahl Al all wa Al Aqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai korelasi yang berkaitan satu sama lain, seperti dalam pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah (eksekutif), serta menyampaikan segala aspirasi rakyat sebagai tempat konsultasi bagi pemimpin negara yang berkaitan dengan hal tertentu, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Tercatat dalam sejarah Islam, pembentukan *Ahl al Hall wa al' Aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Semasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW, para khilafah ar-Rasyidin, musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dengan pendapat dewan permusyawaratan tersebut²².

Abu Bakar selalu menyelesaikan perkara dengan bermusyawarah. Bila dihadapkan dengan suatu permasalahan dan dia tidak menemukan penyelesaiannya dalam Al Quran dan Al Hadist. Dia langsung mengumpulkan para sahabat. Lalu ia bermusyawarah dengan mereka. Jika mereka sepakat atas suatu keputusan dia pun memutuskan permasalahan tersebut dengan keputusan itu²³.

Al Quran dan al Hadist tidak menyebutkan *Ahl Al Hall Wal Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk bahasa sekarang, namun sebutan itu hanya dalam kajian fiqh dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substantial dari dasar-dasar menyeluruh²⁴. Maka dasar sebutan Firman Allah SWT, adalah;

Firman Allah surat An- Nisa ayat 59



Artinya :

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, op.cit., h. 142

²³ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 78

²⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya²⁵.

Dalam demikian, *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* dalam Al Qur'an adalah bagian dari Ulil Amri yaitu sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian fikih Islam telah menciptakan satu bentuk musyawarah dimasa awal timbulnya daulah Islamiyyah di Madinah, sebagaimana ia juga membentuk suatu konstitusi yang dikenal dengan Konstitusi Madinah²⁶.

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala Negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fikih, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan)²⁷.

²⁵ Depag RI, Al Quran dan Terjemahannya, h. 128

²⁶ Konstitusi Madinah merupakan terjemahan dari Kata *Shahifah Al Madinah*, yaitu pasal-pasal tertulis yang dibuat Nabi Muhammad SAW, untuk mengikat dan mengatur Masyarakat Madinah. Sarjana politik Islam menyebut Konstitusi Dustur, sementara yang lain menyebut dengan Piagam Madinah, lihat: Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, (Jakarta:Pustaka Al Kautsar, 2014), h. 11

²⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 68

Namun dalam beberapa segi lain, antara *Ahl-Al-Hall wa al-'Aqd* dan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak identik. Dengan demikian *Ahl-Al-Hall wa al-'Aqd* dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di negara Indonesia yaitu lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, sehingga lembaga ini di sebut juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebutan lain yang sering di pakai dalam parlemen²⁸. Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan²⁹.

Ahl Al-Hall wa al-'Aqd adalah *Ahlul Ikhtiyar* dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Banyaknya nama mereka sebab keberagaman tugas yang mereka emban. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan Legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah. Setelah Islam menyeru untuk memilih seorang pemimpin, ia melengkapi seruanya dengan menyeru kepada ilmu hingga untuk menuntut sesuatu haruslah dengan cara yang semestinya dan jalan yang benar³⁰.

²⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2012), h. 315

²⁹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Sejarah dan Pemikiran*, *op.cit.*, h 67

³⁰ *Ibid.*, h 80

Ilmu yang hanya bertaklid kepada orang-orang yang berilmu pun tidak cukup bagi seorang pemimpin. Akan tetapi, ia harus menjadi seorang mujtahid yang akan memberi nuansa baru terhadap ilmu politik. Sebab, seorang pemimpin dituntut untuk berada di barisan terdepan di lapangan dibandingkan yang lainnya dan membawa bendera, sementara yang lainnya berada di belakang dia.³³

Sebagai contoh betapa pentingnya berijtihad yang dilakukan oleh seorang pemimpin, ketika Umar bin Khattab mengangkat Syuraih bin Harist al Kindy sebagai Qadi untuk wilayah Kufah, Umar Berkata : “lihatlah apa-apa yang jelas bagimu dalam kitab Allah dan janganlah menanyakan hal itu kepada siapapun, dan mengenai apa-apa yang tidak jelas bagimu dalam kitab Allah maka ikutlah

³¹ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyyah*, *op.cit.* h. 19-20

³² Fahmi Asy Syannawi, *Fiqih Politik Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Masa Kini*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 410

³³ *Ibid.*, h 410



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW, dan mengenai apa-apa yang tidak jelas bagimu dalam sunah Rasulullah SAW, maka berijtihadlah dengan pikiranmu mengenai hal itu.³⁴

Rujukan untuk tugas *Ahl- Al -Hall Wa- Al 'Aqd* yang paling utama bisa diangkat adalah bai'ah terhadap Khalifah Abu Bakar Sidiq As Sidiq ketika beliau dilantik menjadi khalifah dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti oleh kebanyakan orang lain. Kelima mereka adalah Umar Bin Khattab, Abu Ubaidah Bin al Jarrah, Usayid Bin Hudair, Bisri Bin Sa'ad, dan Salim bekas hamba Abu Huzaifah³⁵.

Pada masa Rasul, *Ahl- Al -Hall Wa- Al 'Aqd* adalah para sahabat. Yaitu mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, para pemuka sahabat yang sering beliau ajak Musyawarah³⁶.

Imam Abu Al Hasan Ali Bin Muhammad al Mawardi hidup pada seperempat terakhir abad keempat Hijriah dan paroh pertama kelima hijriah³⁷. Ia hidup pada era masa Bani Abbasiyyah.

Patut kita akui bahwa gagasan- gagasan Imam Al Mawardi dalam ranah politik yang dituangkan dalam beberapa karyanya, terutama dalam kitab *Al Ahkam Al Sulthaniyyah*³⁸ sebagai landasan teoritis telah mencapai prestasi. Ia telah mengilhami dan memberikan inspirasi pada alam pemikiran para tokoh dan

³⁴ M. Atho Muzar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Taradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h.34

³⁵ Suyuti Pulungan, *Fqih Siyasah Sejarah dan Pemikiran*.,*op.cit.* h. 113

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 16

³⁸ Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan dalam dua fersi, yaitu versi Gema Insani Press dan Robbani Press, keduanya sama-sama penerbit Jakarta, dalam waktu yang hampir bersamaan pada awal tahun 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pakar politik baik didunia muslim maupun dunia barat, baik dunia akademik maupun politik praktis pada generasi sesudahnya. Selain itu juga imam Al Mawardi memberikan warna baru terhadap pradigma politik Islam yang mengalami kemunduran dan kehancuran. Ide politik imam Al Mawardi memberikan pencerahan sekaligus motivasi para tokoh dunia Islam baik pada abad pertengahan maupun pada abad Kontemporer untuk membangkitkan kembali kejayaan pemerintahan Islam setelah mengalami dekadensi di segala dimensi kehidupan.

Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah merupakan salah satu kitab politik atau hukum ketatanegaraan yang patut mendapat perhatian lebih. Karena, di samping penulisnya, imam al-Mawardi, adalah seorang faqih (ahli hukum Islam), beliau juga hidup dimasa pemerintahan ‘Abbasiyah yang waktu itu merupakan kekhilafahan Islam. Seperti kitab-kitab fiqh politik lainnya, al-Mawardi memberikan tempat untuk menjelaskan perbedaan pendapat dari madzhab lain. Akan tetapi, al-Mawardi lebih mengutamakan pendapat madzhab yang dianutnya, Mahzab As-Syafi’i³⁹.

Faktor yang mendorong Al-Mawardi untuk membukukan pikirannya adalah karena terjadinya krisis khilafah dan madzhab sunni pada pertengahan abad keempat hijriyah.

Sejarah politik yang terjadi di masyarakat arab sebelumnya tidak dapat terpisahkan dengan sejarah agama yang mereka anut. Namun, pada masa Al-Mawardi kondisinya sudah berbeda. Banyak aliran-aliran yang berkembang.

³⁹ Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah*, *op.cit.*, h. 7

Pertama, Imamiyyah yang disokong oleh Buwaihiyah. Kedua, Isma'iliyyah. Ketiga, Sunni.

Kitab Al Ahkam Al Sulthaniyyah adalah karya Al Mawardi yang paling komplit membahas birokrasi, politik kekuasaan, politik kepemimpinan, lembaga politik, pranata sosial dan penanganan konflik atau lembaga peradilan. Kitab Al Ahkam Al Sulthaniyyah merupakan kitab yang paling awal diterbitkan dan paling dikenal didunia Islam. Buku ini telah dicetak berulang kali, cetakan yang paling lama yaitu tahun 1853 M. Di Bonn, Jerman Barat, lalu dicetak di Kairo Mesir⁴⁰. Naskah asli tulisan dari buku ini berada di Paris no 2447 terdiri dari 63 halaman yang ditulis ulang pada tahun 1007 H. Buku ini di tahqiq oleh Ridwan Al Sayyid yang banyak mentahqiq buku-buku karya Al Mawardi⁴¹.

Al Ahkam Al Sulthaniyyah merupakan deskripsi terbaik tentang lembaga-lembaga administrasi dan pemerintahan Islam yang *dusturiyyah*. Bukan saja komplit tetapi juga detail. Persyaratan calon khilafah wilayah-wilayah wewenang dan kekuasaan khalifah, aturan-aturan untuk lembaga kementerian, pejabat-pejabat eksekutif, birokrasi dan tata usaha administrasi, lembaga peradilan, kepala-kepala daerah, panglima-panglima perang semua ini dirinci sedemikian rupa⁴².

Beranjak dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan inti dan mendasar yang perlu diteliti, dianalisis, dan dicarikan jawabannya dengan judul **Eksistensi Ahl- Al- Hall Wa Al-'Aqd Dalam Sistem Kenegaraan Islam Perspektif Imam Al Mawardi Dalam Kitab**

⁴⁰ Al Mawardi, *Adab Ad Dunya Wa Ad Din, Adab Ad- Dunya Wa ad -Din* (Libanon: Dar Al-Fikri, 1994),. h. 11

⁴¹ *Ibid.*, h. 7

⁴² Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah, op.cit.*, h. 4

Al Ahkam Al-Sulthaniyyah Dan Relevansinya Dengan Sistem Parlemen DPR/MPR Republik Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang dibahas dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Konsep Ahl Al Hall Wa Al Aqd Dalam Sistem Kenegaraan Islam Perspektif Imam Al Mawardi Dalam Kitab Al Ahkam Al-Sulthaniyyah
2. Eksistensi Ahl Al Hall Wa Al Aqd Dalam Sistem Kenegaraan Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Parlemen DPR/MPR Republik Indonesia

C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dengan meneliti :

1. Konsep Ahl Al Hall Wa Al Aqd Dalam Sistem Kenegaraan Islam Perspektif Imam Al Mawardi Dalam Kitab Al Ahkam Al-Sulthaniyyah
2. Eksistensi Ahl Al Hall Wa Al Aqd Dalam Sistem Kenegaraan Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Parlemen DPR/MPR Republik Indonesia

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan pemikiran dalam latar belakang di atas dan dari batasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dijadikan obyek kajian dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Ahl Al Hall Wa Al Aqd Dalam Sistem Kenegaraan Islam Perspektif Imam Al Mawardi Dalam Kitab Al Ahkam Al-Sulthaniyyah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Eksistensi *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* Dalam Sistem Kenegaraan Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Parlemen DPR/MPR Republik Indonesia

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Pelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Konsep *Ahl Al Hall Wal Aqd* Dalam Sistem Kenegaraan Islam Perspektif Imam Al Mawardi Dalam Kitab *Al Ahkam Al-Sulthaniyyah*
- b. Untuk Mengetahui Eksistensi *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* Dalam Sistem Kenegaraan Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Parlemen DPR/MPR Republik Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk syarat menyelesaikan studi S.2 PPs. UIN Suska Riau.
- c. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah keilmuan dan kontribusi tentang konsep dan eksistensi *Ahl Al Hall Wa Al Aqd*
- b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan dan masukan kepada pemerintah dalam bidang Politik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, tulisan ini adalah penelitian Kepustakaan (*library research*), yang bersifat kualitatif di mana datanya diperoleh dari buku-buku yang memuat pendapat Al Mawardi tentang Konsep dan Eksistensi *Ahl Al -Hall Wa- Al 'Aqd Dalam Sistem Kenegaraan Islam Dalam Kitab Al Ahkam Al Sulthaniyyah Dan Relevansinya Dengan Sistem Parlemen DPR/MPR Republik Indonesia* kemudian dianalisis dan disusun sehingga memperoleh gambaran yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Adapun data yang akan digali dalam penelitian ini adalah Konsep, Eksistensi dan Relevansi *Ahl Al Hall Wa Al Aqd Dalam Sistem Kenegaraan Islam Perspektif Imam Al Mawardi Dalam Kitab Al Ahkam Al-Sulthaniyyah*.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research*, data yang digunakan adalah buku-buku maupun tulisan-tulisan yang menyangkut dengan tema pembahasan pada penelitian ini. Oleh sebab itu sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Bahan Primer, yaitu bahan-bahan yang dijadikan sebagai sumber utama, yakni kitab *Al Al Ahkam al Sulthaniyyah*, karya Imam al Mawardi
- b. Bahan Sekunder, data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab, buku-buku, Ensiklopedi, kamus-kamus dan data-data yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Data.

Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan

selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan tesis serta dianalisa untuk mencapai pada tujuan pembahasan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian ilmiah, karena dalam penelitian ini, mencoba menggali ide-ide dan gagasan yang objektif tentang Eksistensi Ahl Al Hall Wa Al Aqd Dalam Sistem Kenegaraan Islam Dalam pandangan Al Mawardi. Dari sumber datanya, penelitian ini disebut penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan memanfaatkan secara maksimal bahan-bahan pustaka yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian⁴³. Tentu saja penulis mencari bahan-bahan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan langsung terhadap karya-karya Al Mawardi.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pendekatan kajian dengan hermeneutik⁴⁴, yaitu mencoba menafsirkan dan memahaminya secara sederhana, serta mencoba menjelaskan kembali secara kritis dan detail dengan proses interpretatif. Disini terdapat dua definisi hermeneutik⁴⁵; *Pertama*, merupakan bangunan prinsip-prinsip metodologi dalam penafsiran. *Kedua*, merupakan eksplorasi filosofis tentang karakter-karakter dan kondisi yang dimaksud bagi pemahaman yang utuh.

Di sisi lain, hermeneutika sebagai penemuan kembali (*hermeneutics of recovery*) menegaskan tujuan interpretasi adalah menemukan makna asli suatu

⁴³ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). h. 65

⁴⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 164

⁴⁵ Secara etimologis hermeneutika berasal dari bahasa Yunani "hermeneutikos", "hermeneuein" yang berarti menafsirkan, makna kata "hermeneia" secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan metode *deskriptif analitik*, yaitu secara sistematis peneliti mendeskripsikan dan mempelajari karya-karya Al Mawardi berupa latar belakang pemikiran dan kehidupannya, dan pendapat para ahli yang relevan juga digunakan. Tahap berikutnya penulis mencoba melakukan *interpretasi*, sesuai dengan keinginan yang hendak diteliti. Artinya peneliti mendalami keseluruhan pemikiran Al Mawardi secara mendalam tetap bertumpu pada evidensi objektif untuk memperoleh keotentikan dan orisinalitas mengenai Eksistensi *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* Dalam Sistem Kenegaraan Islam Dalam Pandangan Al Mawardi. Dalam metode ini tentu mempunyai sebuah konsekuensi yang tajam dalam andilnya membentuk *system of thought* (cara berpikir) bagi peneliti, konsekuensinya dengan kondisi sosial sosiologis yang berbeda.

G. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai *Ahl al Ummah Wa al Aqd*, telah banyak dikaji oleh cendekiawan muslim dan para pakar politik ketatanegaraan Islam maupun para akademisi. Diantaranya adalah: *Pertama* adalah tulisan yang ditulis oleh Dzajuli

dengan judul “Fiqh Siyasah sebagai Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah”. Tulisan ini memaparkan secara jelas mengenai tugas dan wewenang *Ahlul Hall wal Aqd* sebagai institusi ketatanegaraan Islam. *Kedua* adalah tulisan yang ditulis Farid Abdul Khaliq dengan judul “Fiqh Politik Islam”. Tulisan ini menjelaskan secara jelas mengenai landasan, syarat, dan tugas dari *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* sebagai institusi ketatanegaraan Islam. Tulisan ini juga menyamakan *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* sebagai Dewan Perwakilan rakyat. *Ketiga* adalah tulisan yang dikaji oleh Muhammad Iqbal dengan judul “Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer”. Tulisan ini menganalisis tentang pemikiran Mawardi tentang *Ahl Al Hall Wa Al Aqd*, dan membahas tentang bagaimana Mawardi menerapkan teorinya di dalam pemerintahan yang kekuasaannya absolut. *Keempat* Tesis yang ditulis oleh Zulfiyar dengan judul Konsep Negara Islam (Pemikiran Politik Imam al Mawardi) dalam Tesis ini Zulfiyar membahas tentang *Konsep Negara Islam Hubungan Tentang Dimensi Politik Dan Agama*.

Eksistensi *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* Dalam Sistem Kenegaraan Islam Perspektif Imam Al Mawardi Dalam kitab *Al Ahkam Al-Sulthaniyyah* Dan Relevansinya Dengan Sistem Parlemen DPR/MPR Republik Indonesia belum begitu banyak ditulis sebagai karya ilmiah, hanya di tulis berbentuk makalah atau tulisan- tulisan pendek. Dengan demikian masalah *Ahl Al Hall Wa Al Aqdi* ini cocok dan sesuai untuk diteliti sebagai karya ilmiah.

H. Teknik Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulisan tesis ini mengacu pada buku panduan penulisan Tesis dan Desertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2012.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis ini tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan Berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Bab ini berisi Biografi Imam al Mawardi, Riwayat Pendidikan dan Kepribadian Al Mawardi, Lingkungan Sosial Politik Pada Masa Hidup Imam Al Mawardi, Karya-Karya Imam al Mawardi dan Integritas Imam Al Mawardi.
- BAB III** : Bab ini berisi teori tentang *Ahl Al Hall Wal Aqdi*, berisi tentang Pengertian Ahl al Hall Wal Aqdi, Dasar Hukum Ahl al Hall Wal Aqdi, Sejarah Ahl al Hall Wal Aqdi, Syarat dan Mekanisme Pengangkatan Ahl al Hall Wal Aqdi, dan Fungsi, Tugas dan Wewenang *Ahl Al Hall Wal Aqdi*
- BAB IV** : Bab ini berisi Konsep Ahl Al Hall Wal Aqdi Dalam Sistem Kenegaraan Islam Perspektif Imam Al Mawardi Dalam Kitab Al Ahkam Al-Sulthaniyyah dan Eksistensi Ahl al Hall wal Aqdi dalam

Sistem Kenegaraan Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Parlemen DPR/MPR Republik Indonesia

BAB V : Penutup dan Saran Dalam Penulisan Tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.